

RUNTUHNYA DOMINASI KELUARGA RATU ATUT DALAM PILKADA BANTEN 2024: ANALISIS DINAMIKA POLITIK LOKAL

MUHAMMAD DWI NURFAISAL^{1*}, INRINOFITA SARI²
Universitas Pamulang^{1,2}

Email: dosen03014@unpam.ac.id^{1*}, dosen03013@unpam.ac.id²

Abstract: *This study aims to analyze the factors that led to the collapse of Ratu Atut's family dominance in the 2024 Banten regional election. Using qualitative research methods and qualitative data analysis (QDA) through a descriptive approach, this study explores the local political dynamics that influenced the election outcome. Data was collected from online media sources, official websites, and relevant previous studies. Data processing was conducted using Nvivo 12 Plus software, with Crosstab Query features to visualize relationships between variables and Word Cloud to identify dominant words in the data. The results showed that four main factors caused the collapse of Ratu Atut's family dominance, namely changes in voter preferences that are more critical of integrity and transparency, the strengthening of organized opposition political movements, the increasing participation of the younger generation who utilize digital platforms, and the negative image of the family due to various legal cases. This research makes an important contribution in understanding the dynamics of political transition in Banten, which not only reflects the increasing political awareness of the people but also an opportunity to strengthen local democratic institutions.*

Keywords: *Banten Election, Community Participation, Ratu Atut Family.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya dominasi keluarga Ratu Atut dalam Pilkada Banten 2024. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan analisis data qualitative data analysis (QDA) melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi dinamika politik lokal yang memengaruhi hasil Pilkada. Data dikumpulkan dari sumber-sumber media online, website resmi, dan studi sebelumnya yang relevan. Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak Nvivo 12 Plus, dengan fitur Crosstab Query untuk memvisualisasikan hubungan antar variabel dan Word Cloud untuk mengidentifikasi kata-kata dominan dalam data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat faktor utama menjadi penyebab runtuhnya dominasi keluarga Ratu Atut, yaitu perubahan preferensi pemilih yang lebih kritis terhadap integritas dan transparansi, menguatnya gerakan politik oposisi yang terorganisir, meningkatnya partisipasi generasi muda yang memanfaatkan platform digital, serta citra negatif keluarga akibat berbagai kasus hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika transisi politik di Banten, yang tidak hanya mencerminkan meningkatnya kesadaran politik masyarakat tetapi juga peluang untuk memperkuat institusi demokrasi lokal.

Kata Kunci: Pilkada Banten, Partisipasi Masyarakat, Keluarga Ratu Atut

A. Pendahuluan

Demokrasi, pada hakikatnya, merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Noviati, 2013). Sebagai pemegang kedaulatan, partisipasi rakyat seharusnya tidak berhenti hanya dalam pemungutan suara di bilik TPS, tetapi juga mencakup seluruh tahap kehidupan bernegara. Dalam setiap tingkatan, rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Demokrasi, sebagaimana diungkapkan oleh (Perdana, 2019), menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu untuk memimpin, mulai dari tingkat nasional hingga tingkat desa. Lebih lanjut, demokrasi serta hadirnya liberalisasi politik memungkinkan semua golongan atau kelompok masyarakat memanfaatkan panggung politik untuk menunjukkan kekuatan mereka (HR & Harakan, 2017).

Partisipasi politik secara literal mengacu pada keikutsertaan warga dalam proses politik, yang tidak hanya terbatas pada dukungan terhadap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh

para pemimpin. Partisipasi politik berbeda dari mobilisasi politik, yang lebih bersifat pasif dan terarah (Saputra & Asih, 2017). Partisipasi politik melibatkan keterlibatan aktif warga dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan hingga evaluasi keputusan, termasuk kesempatan untuk berperan serta dalam pelaksanaannya (Siregar, 2023).

Provinsi Banten telah menjadi panggung dominasi politik keluarga Ratu Atut Chosiyah sejak pemekaran pada tahun 2000, ketika provinsi ini memisahkan diri dari Jawa Barat untuk membangun identitas politik dan administrasi yang mandiri. Dalam kurun waktu tersebut, keluarga Ratu Atut berhasil mengukuhkan pengaruhnya dengan menguasai berbagai jabatan strategis, seperti gubernur, wakil gubernur, hingga kepala daerah di tingkat kabupaten/kota, termasuk posisi kunci dalam birokrasi dan legislatif. Penguasaan ini tidak hanya memperkuat hegemoni politik mereka tetapi juga menciptakan jejaring kekuasaan yang melibatkan relasi keluarga, elite lokal, dan patronase politik yang luas. Fenomena ini sering dikaitkan dengan istilah "dinasti politik," di mana kekuasaan cenderung diwariskan dalam lingkaran keluarga tanpa memberikan ruang kompetisi yang sehat bagi aktor politik lain (Hadiz, 2010). Dinasti ini telah membentuk corak tersendiri dalam demokrasi lokal di Banten, di mana pola-pola patronase, mobilisasi politik berbasis keluarga, dan kontrol terhadap sumber daya daerah menjadi strategi utama mempertahankan kekuasaan (Rahawarin, 2022). Meskipun mendapat kritik dari berbagai pihak, dominasi ini bertahan lama karena keterlibatan mereka tidak hanya dalam politik elektoral tetapi juga dalam struktur sosial-ekonomi masyarakat, termasuk pengaruh terhadap distribusi bantuan sosial, alokasi proyek pembangunan, dan pengendalian akses terhadap sumber daya lokal.

Pilkada Banten 2024 menandai babak baru dalam lanskap politik lokal, dengan melemahnya dominasi keluarga Ratu Atut yang selama ini menjadi aktor utama dalam perpolitikan di provinsi ini. Kegagalan kandidat dari keluarga tersebut dalam meraih kemenangan tidak hanya mencerminkan berakhirnya kontrol dinasti ini atas proses politik elektoral, tetapi juga menandai perubahan signifikan dalam preferensi politik masyarakat yang semakin kritis dan dinamis. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma politik, di mana masyarakat mulai meninggalkan pola loyalitas tradisional yang berbasis keluarga atau patronase menuju preferensi yang lebih terbuka terhadap kandidat yang menawarkan program dan visi yang lebih relevan dengan kebutuhan mereka (Sutisna & SH, 2024). Beberapa faktor utama yang mendorong dinamika ini antara lain perubahan demografi pemilih, di mana generasi muda dengan akses informasi yang lebih luas memainkan peran yang signifikan dalam menentukan hasil kontestasi (Wartoyo & Ginting, 2024). Kelompok ini cenderung lebih independen dalam memilih dan tidak terikat oleh struktur patronase tradisional. Selain itu, pengaruh gerakan antikorupsi yang semakin masif, baik di tingkat nasional maupun lokal, juga berkontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan (Anggreini, 2024). Gerakan ini didukung oleh meningkatnya pemberitaan media mengenai kasus-kasus korupsi yang melibatkan aktor politik, termasuk keluarga Ratu Atut, yang pada akhirnya menggerus kepercayaan masyarakat terhadap dinasti tersebut (Rifaid & Rusnaedy, 2019).

Kemunculan tokoh-tokoh politik alternatif dengan latar belakang yang beragam juga menjadi salah satu pendorong utama perubahan ini (Ardipandanto, 2020). Kandidat-kandidat baru ini tidak hanya membawa semangat pembaruan, tetapi juga strategi kampanye yang inovatif dengan memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pemilih muda dan masyarakat perkotaan (Herdiansah et al., 2014). Mereka berhasil menawarkan narasi politik yang berbeda, yang tidak hanya berfokus pada personalisasi kekuasaan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Di sisi lain, keberadaan regulasi yang lebih ketat terhadap politik uang dan upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memastikan proses pemilu yang lebih bersih turut menciptakan ruang kompetisi yang lebih adil bagi semua peserta (Rahawarin, 2022).

Perubahan ini menunjukkan bahwa politik lokal di Banten mulai bergerak menuju pola demokrasi yang lebih substantif, di mana preferensi politik masyarakat didasarkan pada evaluasi terhadap program dan rekam jejak kandidat, bukan sekadar ikatan kultural atau hubungan patron-klien. Transformasi ini diharapkan dapat menjadi awal bagi terciptanya sistem politik

yang lebih inklusif dan kompetitif, yang pada akhirnya mendorong perbaikan dalam tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten menunjukkan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada 2024 mencapai 8,5 juta orang, dengan pemilih muda (usia 17–35 tahun) mendominasi hingga 54%. Dari segi pendidikan, mayoritas pemilih memiliki latar belakang pendidikan menengah (SMA/SMK) sebesar 60%, diikuti oleh pendidikan sarjana (S1) sebesar 20%, dan sisanya (SD/SMP) 20%. Komposisi ini menunjukkan peran signifikan generasi muda dan kelompok pemilih dengan tingkat pendidikan menengah ke atas dalam membentuk preferensi politik yang baru.

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya dominasi politik keluarga Ratu Atut dalam Pilkada Banten 2024 serta dampaknya terhadap dinamika politik lokal. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memahami perubahan pola demokrasi lokal di Indonesia sekaligus implikasinya terhadap praktik politik yang lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

B. Metode Penelitian

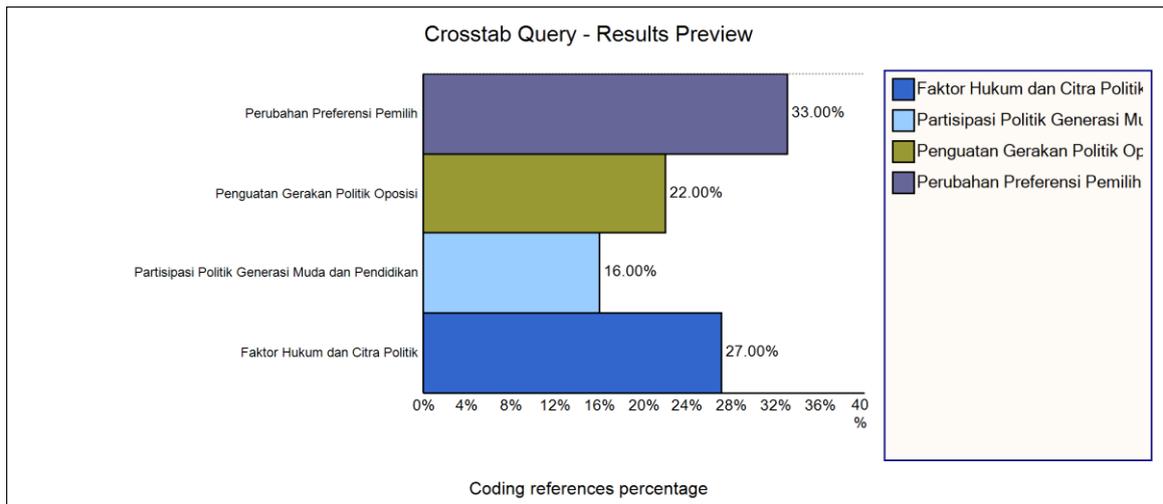
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor penyebab runtuhnya dominasi politik keluarga Ratu Atut dalam Pilkada Banten 2024 serta dampaknya terhadap dinamika politik lokal. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup analisis artikel, laporan, dan berita yang diterbitkan di berbagai media online, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Selain itu, analisis dokumen digunakan untuk mengkaji data dari sumber-sumber resmi, seperti laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan statistik pemilih pada Pilkada Banten 2024. Data yang terkumpul diolah menggunakan perangkat lunak Nvivo 12 Plus untuk mempermudah proses analisis. Proses ini melibatkan pengimporan data ke dalam perangkat lunak, diikuti dengan koding untuk mengidentifikasi tema utama. Analisis lebih lanjut dilakukan menggunakan fitur Crosstab Query untuk melihat persentase data yang telah dikoding dan memvisualisasikan hubungan antar variabel, serta Word Cloud untuk mengidentifikasi kata-kata atau konsep dominan dalam data. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika politik lokal di Banten, khususnya dalam konteks perubahan preferensi politik masyarakat dan implikasinya terhadap demokrasi yang lebih inklusif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab Runtuhnya Dominasi Keluarga Ratu Atut

Pilkada Banten 2024 menandai perubahan besar dalam lanskap politik lokal yang telah didominasi oleh keluarga Ratu Atut sejak pemekaran provinsi pada tahun 2000. Dominasi politik keluarga ini, yang dikenal sebagai dinasti politik, mulai mengalami penurunan tajam, yang tercermin dari kegagalan kandidat yang diusung oleh keluarga tersebut untuk memenangkan kontestasi politik. Pergeseran ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam preferensi politik masyarakat Banten, yang sebelumnya cenderung terikat pada hubungan patron-klien dan loyalitas kultural terhadap keluarga penguasa.

Perubahan besar dalam lanskap politik lokal ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari berbagai faktor yang saling berinteraksi. Pemilu 2024 memperlihatkan bahwa masyarakat Banten mulai lebih kritis dalam memilih pemimpin, dan lebih mengutamakan rekam jejak, visi misi, serta kapasitas kandidat daripada ikatan emosional dengan kekuasaan yang sudah lama berkuasa. Pergeseran ini juga tidak terlepas dari dinamika sosial dan politik yang lebih luas, termasuk meningkatnya kesadaran akan pentingnya pemerintahan yang bersih dari korupsi dan lebih transparan dalam mengelola kekuasaan. Beberapa faktor yang dapat menjelaskan runtuhnya dominasi politik keluarga Ratu Atut dalam Pilkada Banten 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Faktor Penyebab Runtuhnya Dominasi Keluarga Ratu Atut
Sumber: Olahan Data Penulis Menggunakan Nvivo 12 Plus

Pada gambar 1 diatas menunjukkan bahwa Runtuhnya Dominasi Keluarga Ratu Atut disebabkan beberapa faktor, Perubahan Preferensi Pemilih, Penguatan Gerakan Politik Oposisi, Faktor Hukum dan Citra Politik dan Partisipasi Politik Generasi Muda dan Pendidikan. Perubahan preferensi pemilih menjadi salah satu faktor utama runtuhnya dominasi keluarga Ratu Atut dalam Pilkada Banten 2024 dengan presentase 33%. Generasi muda, yang mendominasi komposisi pemilih dengan usia 17-35 tahun mencapai 54% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT), menunjukkan kecenderungan politik yang lebih rasional dan kritis. Mereka lebih memprioritaskan gagasan, program konkret, dan rekam jejak kandidat dibandingkan dengan ikatan kekerabatan atau tradisi dinasti politik. Hal ini sejalan dengan teori politik modern yang menekankan pentingnya akuntabilitas pemimpin di mata pemilih yang semakin berpendidikan (Iskandar, 2017). Selain itu, generasi muda saat ini memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi politik melalui media sosial dan platform digital. Informasi yang transparan dan cepat memungkinkan mereka untuk mengevaluasi kinerja pemimpin sebelumnya, termasuk kasus-kasus kontroversial yang melibatkan keluarga Ratu Atut. Fenomena ini memicu pergeseran sikap pemilih muda terhadap praktik politik dinasti yang dianggap kurang memberikan inovasi dan perubahan signifikan dalam pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari rendahnya elektabilitas kandidat keluarga Atut di kalangan pemilih muda. Lebih lanjut, pemilih muda di Banten memiliki orientasi politik yang lebih progresif dan inklusif. Sikap kritis mereka terhadap praktik oligarki politik menandai perubahan siklus politik lokal di Banten. Ini sejalan dengan tren global di mana pemilih muda berperan besar dalam mendorong demokratisasi dan menentang konsentrasi kekuasaan politik pada segelintir kelompok atau keluarga (Hadiz, 2010). Kondisi ini membuat dinasti politik semakin sulit mempertahankan posisinya di tengah tuntutan perubahan. Akhirnya, pendidikan yang lebih baik turut memperkuat kemampuan pemilih muda dalam memahami politik. Tingkat pendidikan menengah ke atas, yang mendominasi komposisi DPT, memainkan peran signifikan dalam membentuk preferensi politik yang lebih objektif. Pemilih dengan pendidikan SMA/SMK sebesar 60% dan sarjana 20% cenderung mencari calon pemimpin yang memiliki visi pembangunan yang jelas dan kredibel, bukan sekadar didasarkan pada popularitas keluarga atau patronase politik.

Selanjutnya Gerakan politik oposisi di Banten berhasil mematahkan dominasi keluarga Ratu Atut melalui koalisi yang kuat dan terorganisir. Partai-partai oposisi, yang sebelumnya terfragmentasi, berhasil membentuk aliansi strategis untuk menghadapi dominasi politik dinasti. Koalisi ini tidak hanya efektif dalam menggalang kekuatan politik, tetapi juga berhasil menyuarakan isu-isu kritis yang menjadi perhatian masyarakat, seperti transparansi, korupsi, dan pemerataan pembangunan. Dukungan luas dari masyarakat terhadap partai dan figur oposisi menunjukkan adanya keinginan besar untuk perubahan politik di Banten. Koalisi politik oposisi juga memanfaatkan momentum kebosanan publik terhadap dinasti yang telah berkuasa selama lebih dari dua dekade. Dinamika ini diperkuat oleh munculnya tokoh-tokoh alternatif yang

dinilai memiliki kapasitas dan integritas lebih baik. Figur-figur ini, yang didukung oleh partai oposisi, menjadi simbol perlawanan terhadap status quo politik yang dianggap tidak lagi relevan dengan aspirasi masyarakat modern. Fenomena ini menunjukkan bahwa politik lokal di Banten sedang bergerak ke arah yang lebih kompetitif dan demokratis. Selain itu, gerakan politik oposisi di Banten didukung oleh organisasi masyarakat sipil dan elemen pemuda yang aktif mengampanyekan gerakan antidinasti politik. Aktivitas ini menciptakan tekanan tambahan terhadap keluarga Ratu Atut dan memobilisasi pemilih untuk mendukung kandidat alternatif. Kekuatan kolektif dari berbagai elemen ini mempersempit ruang gerak politik keluarga Ratu Atut dan melemahkan daya tawar mereka dalam kontestasi Pilkada 2024. Kombinasi antara strategi politik oposisi yang matang dan mobilisasi suara masyarakat menghasilkan kekuatan baru yang mampu mendisrupsi dominasi keluarga Ratu Atut. Dukungan publik terhadap gerakan oposisi menegaskan adanya pergeseran pola pikir pemilih yang menginginkan perubahan dan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Selanjutnya Faktor Hukum dan Citra Politik dengan presentase 27% menunjukkan bahwa Kasus-kasus hukum yang melibatkan keluarga Ratu Atut menjadi faktor krusial dalam melemahkan dominasi politik mereka. Berbagai kasus korupsi yang menyeret anggota keluarga, termasuk vonis terhadap Ratu Atut sendiri, telah mencoreng citra politik keluarga tersebut. Hal ini berakibat pada berkurangnya tingkat kepercayaan publik, terutama di kalangan pemilih muda yang semakin kritis terhadap isu-isu integritas dan akuntabilitas pemimpin. Aspirasi untuk kepemimpinan bersih menjadi pendorong utama pemilih dalam menolak politik dinasti. Kasus korupsi yang melibatkan keluarga Ratu Atut tidak hanya berdampak pada persepsi publik tetapi juga memberikan ruang bagi lawan politik untuk mengeksploitasi kelemahan tersebut. Dalam Pilkada 2024, isu korupsi menjadi bahan utama kampanye dari kandidat-kandidat oposisi. Pemberitaan media yang masif mengenai kasus ini turut memperburuk citra keluarga Ratu Atut dan menguatkan persepsi negatif terhadap keberlanjutan dinasti politik mereka. Lebih jauh, tingginya ekspektasi publik terhadap kepemimpinan yang bersih membuat masyarakat Banten semakin vokal dalam menyuarakan penolakan terhadap politik yang dianggap sarat dengan korupsi. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi modern yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemimpin daerah. Citra negatif yang melekat pada keluarga Ratu Atut menjadi hambatan besar dalam menarik dukungan pemilih di Pilkada 2024. Pada akhirnya, faktor hukum dan citra politik yang negatif berperan signifikan dalam meruntuhkan dominasi keluarga Ratu Atut. Isu-isu ini menciptakan ruang bagi munculnya pemimpin-pemimpin alternatif yang mampu menawarkan harapan baru bagi masyarakat Banten.

Kemudian Partisipasi Politik Generasi Muda dan Pendidikan dengan Presentase 16%, Tingginya partisipasi politik generasi muda dalam Pilkada Banten 2024 menjadi penanda penting dalam runtuhnya dominasi keluarga Ratu Atut. Dengan komposisi pemilih muda mencapai 54%, keterlibatan mereka dalam proses politik menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan pemilu sebelumnya. Generasi muda, yang lebih melek teknologi dan informasi, cenderung aktif dalam mengkritisi isu-isu politik lokal dan mendorong agenda perubahan. Mereka menjadi kelompok strategis yang sulit diabaikan dalam peta politik Banten. Selain faktor usia, latar belakang pendidikan pemilih turut memengaruhi hasil Pilkada Banten 2024. Pemilih dengan pendidikan menengah dan tinggi lebih cenderung memilih kandidat berdasarkan kompetensi dan integritas daripada faktor kekerabatan. Dengan pemilih berpendidikan SMA/SMK sebesar 60% dan sarjana 20%, preferensi pemilih di Banten mencerminkan peningkatan kesadaran politik yang signifikan. Pendidikan membentuk pola pikir kritis yang memungkinkan pemilih mengevaluasi program kerja calon pemimpin secara objektif. Peran generasi muda dan pemilih berpendidikan tinggi dalam Pilkada 2024 juga didukung oleh peningkatan akses informasi. Platform media sosial menjadi sarana utama bagi generasi muda untuk mendapatkan informasi politik, berdiskusi, dan memobilisasi dukungan. Hal ini memudahkan mereka dalam menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan rasional, bukan sekadar pengaruh keluarga atau elite politik lokal. Dengan partisipasi politik yang semakin tinggi dan berlandaskan pendidikan, generasi muda di Banten berhasil mendorong perubahan politik yang lebih demokratis. Dinamika ini menjadi pelajaran penting bahwa regenerasi

kepemimpinan di tingkat lokal sangat bergantung pada partisipasi aktif pemilih muda yang kritis dan berpendidikan.

2. Dinamika Politik Lokal Pascapilkada 2024

Runtuhnya dominasi keluarga Ratu Atut dalam Pilkada Banten 2024 membuka ruang bagi munculnya kepemimpinan baru yang lebih plural dan demokratis. Kejatuhan dinasti politik yang telah menguasai Banten selama lebih dari dua dekade menandakan adanya transisi politik dari oligarki dinasti menuju kompetisi yang lebih terbuka dan sehat. Menurut Mietzner (2014), perubahan dalam politik lokal sering kali dipicu oleh kombinasi faktor internal, seperti konflik dalam keluarga dinasti, dan faktor eksternal, seperti tekanan dari masyarakat sipil dan partai oposisi. Dalam konteks Banten, kedua faktor ini berperan signifikan dalam membuka peluang bagi aktor-aktor politik baru untuk tampil dan mengambil alih kekuasaan.

Transisi ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat Banten yang sebelumnya cenderung permisif terhadap praktik politik dinasti. Dengan semakin tingginya akses terhadap informasi dan pendidikan, masyarakat mulai menuntut akuntabilitas, transparansi, dan meritokrasi dalam kepemimpinan daerah. Fenomena ini dapat dilihat sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi di tingkat lokal, di mana kontestasi politik tidak lagi didasarkan pada ikatan kekerabatan, melainkan pada kapasitas dan rekam jejak calon pemimpin (Hadiz, 2010). Munculnya tokoh-tokoh alternatif yang mampu menawarkan visi pembangunan konkret menjadi tanda positif bagi perkembangan politik lokal yang lebih inklusif.

Selain itu, dinamika politik pascapilkada juga ditandai dengan peningkatan peran organisasi masyarakat sipil dan media dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Masyarakat sipil di Banten, termasuk LSM dan organisasi pemuda, semakin aktif dalam mengawal kebijakan publik dan memastikan adanya pemerintahan yang bersih dan responsif. Aktivitas ini mencerminkan peningkatan partisipasi publik dalam politik lokal, yang sebelumnya terhambat oleh kuatnya pengaruh keluarga Ratu Atut dan minimnya ruang bagi oposisi. Peran ini sejalan dengan teori partisipasi politik yang menekankan pentingnya pengawasan publik dalam mendorong transparansi pemerintahan (Aspinall & Sukmajati, 2015).

Di sisi lain, munculnya aktor-aktor politik baru turut memicu kompetisi yang lebih sehat dan dinamis di Banten. Partai-partai politik yang sebelumnya berada dalam bayang-bayang dominasi keluarga Ratu Atut kini memiliki kesempatan untuk membangun basis dukungan yang lebih luas. Hal ini mendorong munculnya kepemimpinan baru yang lebih representatif dan berorientasi pada pelayanan publik. Kompetisi yang terbuka ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan program pemerintah daerah yang lebih berpihak kepada rakyat. Studi Mietzner (2014) menegaskan bahwa kompetisi politik yang sehat menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan desentralisasi di Indonesia.

Namun, transisi politik ini juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Pergantian kekuasaan sering kali disertai dengan risiko fragmentasi politik dan ketidakstabilan pemerintahan, terutama jika aktor-aktor politik baru belum memiliki pengalaman yang memadai. Situasi ini memerlukan adanya konsolidasi di antara pemimpin-pemimpin baru dan partai politik untuk memastikan stabilitas politik dan kelancaran proses pemerintahan. Dalam studi kasus Indonesia, Hadiz (2010) menyebutkan bahwa stabilitas politik di tingkat lokal sangat bergantung pada kemampuan aktor politik untuk membangun koalisi yang solid dan menghindari konflik internal.

Selain itu, dinamika politik pasca-Pilkada 2024 juga dipengaruhi oleh ekspektasi tinggi masyarakat terhadap pemimpin baru. Publik berharap kepemimpinan yang muncul pasca-runtuhnya dominasi keluarga Ratu Atut dapat membawa perubahan signifikan, terutama dalam hal pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas layanan publik, dan percepatan pembangunan infrastruktur. Pemenuhan harapan ini menjadi tantangan utama bagi pemerintahan baru. Jika tidak dikelola dengan baik, kekecewaan publik dapat memicu siklus politik yang tidak stabil dan melemahkan kepercayaan terhadap institusi demokrasi lokal.

Dengan demikian, dinamika politik lokal pascapilkada di Banten mencerminkan fase transisi dari dominasi politik dinasti menuju politik yang lebih kompetitif dan inklusif. Keberhasilan proses ini bergantung pada sinergi antara pemimpin baru, partai politik, dan

masyarakat sipil dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Runtuhnya dominasi keluarga Ratu Atut memberikan pelajaran penting bahwa keberlanjutan kekuasaan politik di era demokrasi modern sangat bergantung pada kemampuan pemimpin untuk memenuhi aspirasi rakyat dan menjaga kepercayaan publik.



Gambar 2. Topik Paling Banyak di Bicarakan terkait Runtuhnya dominasi keluarga ratu atut dalam pilkada banten 2024

Sumber: Olahan Data Penulis Menggunakan Nvivo 12 Plus

Berdasarkan pada gambar 5 di atas menunjukkan kata populer yang terlihat dalam media dengan menggunakan word cloud analisis dengan batas kata yang muncul adalah 50 kata dimana dalam narasi tersebut terlihat kata Politik menunjukkan kata yang paling banyak dan sering dibicarakan dalam pembahasan topik Runtuhnya dominasi keluarga ratu atut dalam pilkada banten 2024. Namun juga terlihat kata yang cukup mengimbangi ukuran kata Politik yaitu Pemilih, Keluarga, Atut, Banten, dan Masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keterkaitan isu politik dengan peran keluarga Ratu Atut serta respons masyarakat terhadap dinasti politik tersebut. Kehadiran kata "pemilih" yang signifikan menegaskan perhatian pada perubahan preferensi pemilih, yang mungkin menjadi salah satu faktor kunci dalam melemahnya pengaruh dinasti politik keluarga Atut. Hal ini juga mengindikasikan bahwa perilaku pemilih mulai dipengaruhi oleh isu-isu seperti transparansi, efektivitas kepemimpinan, dan keterlibatan politik yang lebih luas di luar lingkup keluarga Atut. Kombinasi kata-kata tersebut mengindikasikan bahwa dominasi keluarga Ratu Atut tidak lagi sepenuhnya diterima masyarakat, seiring dengan meningkatnya kesadaran pemilih dan dinamika politik lokal yang lebih kompetitif. Kata "masyarakat" menunjukkan peran aktif warga Banten dalam menilai ulang sistem politik yang berbasis dinasti. Pergeseran ini mencerminkan perubahan paradigma, di mana masyarakat menginginkan representasi yang lebih inklusif dan berbasis kinerja. Ini juga menggambarkan tantangan yang dihadapi keluarga Atut untuk mempertahankan pengaruhnya, terutama ketika masyarakat mulai memprioritaskan isu-isu yang lebih mendasar seperti pelayanan publik dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan demikian, runtuhnya dominasi ini dapat dilihat sebagai bagian dari proses demokratisasi yang lebih luas di wilayah Banten.

D. Penutup

Runtuhnya dominasi keluarga Ratu Atut dalam Pilkada Banten 2024 dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, mencerminkan dinamika politik lokal yang semakin kompleks. Faktor utama meliputi perubahan preferensi pemilih, penguatan gerakan oposisi, citra negatif akibat kasus hukum yang melibatkan keluarga tersebut, serta meningkatnya partisipasi politik generasi muda. Data pemilih tetap menunjukkan bahwa segmen pemilih muda (usia 17-35 tahun) dan pemilih dengan latar belakang pendidikan menengah ke atas memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil Pilkada. Mereka cenderung lebih kritis terhadap isu-isu integritas, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Selain itu, munculnya gerakan oposisi yang terorganisir dan strategi kampanye berbasis isu lokal turut memperlemah dominasi keluarga Ratu Atut. Citra negatif yang melekat akibat berbagai kasus hukum juga memperburuk kepercayaan publik, sehingga mengurangi elektabilitas keluarga tersebut di mata pemilih. Generasi muda, yang lebih melek teknologi dan aktif di media sosial, memanfaatkan platform

digital untuk menyuarakan aspirasi dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemimpin yang bersih dan berintegritas.

Pascapilkada, dinamika politik lokal di Banten menunjukkan pergeseran ke arah yang lebih kompetitif dan demokratis. Kepemimpinan baru menghadirkan harapan akan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Namun, transisi ini tidak tanpa tantangan. Stabilitas politik perlu dijaga untuk memastikan kesinambungan program pemerintahan, sementara penguatan institusi demokrasi menjadi agenda penting untuk mencegah kembalinya dominasi kekuatan politik tertentu. Dalam konteks ini, peran masyarakat sipil, media, dan generasi muda menjadi sangat penting dalam mengawal pemerintahan baru. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan partisipasi politik dapat mendorong pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan kelompok strategis lainnya, Banten memiliki peluang besar untuk menjadi contoh sukses dalam transisi politik lokal di Indonesia, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap demokrasi di tingkat daerah.

Daftar Pustaka

- Anggreini, O. (2024). Peran Masyarakat Dan Mahasiswa Dalam Membangun Budaya Anti Korupsi Untuk Mewujudkan Kehidupan Yang Sejahtera, Jujur Dan Bersih. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 7(7), 11–20.
- Ardipandanto, A. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(1), 43–63.
- Hadiz, V. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective*. Stanford University Press.
- Herdiansah, A. G., Gunawan, W., & Muhamad, R. A. T. (2014). Gerakan Komunitas Kota dan Politik Pemilu dalam Pemenangan Ridwan Kamil-Oded Danial pada Pemilihan Walikota Bandung 2013. *Proceeding Konferensi Nasional Sosiologi III: Transformasi Demokrasi Indonesia Menuju Perubahan Yang Bermakna*, 955–975.
- HR, F. S., & Harakan, A. (2017). Eksklusivitas adat dalam bingkai demokrasi di Indonesia. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(1).
- Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya partisipasi dan peranan kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 17–35.
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan sistem pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333–354.
- Perdana, R. A. (2019). *Eksistensi calon perseorangan dalam pemilukada di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Rahawarin, Z. A. (2022). *Buku Dinamika politik uang dalam pemilihan kepala daerah*. Pustaka Pelajar.
- Rifaid, R., & Rusnaedy, Z. (2019). Collective Action NGO dalam Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sulawesi Selatan. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 2(2), 89–103.
- Saputra, I., & Asih, N. W. (2017). Kepemimpinan perempuan dan pilkada serentak. *ARISTO*, 5(1), 141–162.
- Siregar, M. (2023). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Mempertahankan Desa Mandiri (Studi Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban). *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK*, 3(1).
- Sutisna, I. N., & SH, M. B. A. (2024). *Digital Marketing For Politics: Pemasaran Politik Era Digital*. Penerbit Adab.
- Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2024). Sosialisasi Generasi Z Dalam Partisipasi Pemilu 2024. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(02), 132–143.